



LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan II
Tahun 2021



 loka_banyumas@pom.go.id

 [lokapom_banyumas](#)

 [Loka POM Banyumas](#)



Loka POM Banyumas



(0281) 631222

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumwa Rahmatullahi wa Barakatuh,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di 4 (empat) wilayah kerja kami, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan merangkum hasilnya dalam bentuk Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2021. Pembuatan Laporan Kinerja Interim Triwulan II merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dalam penggunaan anggaran negara dan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas pada tahun berikutnya.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II, serta evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dan realisasi anggaran. Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua mitra kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas dan semua pihak terkait yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas. Semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2021 ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Banyumas, 19 Juli 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Banyumas



Sulyanto, S.H., M.H.

NIP. 19661207 198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
HIGHLIGHT KEGIATAN LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN II	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Gambaran Umum Institusi	9
B. Analisis Lingkungan Strategis	9
C. Isu Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	12
B. Visi dan Misi Badan POM	13
C. Budaya Organisasi	13
D. Kegiatan Utama	14
E. Kegiatan Prioritas	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja	17
B. Laporan Capaian Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	25
A. KESIMPULAN	25
B. SARAN	25

HIGHLIGHT KEGIATAN LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS

TRIWULAN II

HIGHLIGHT KEGIATAN BULAN APRIL

Intensifikasi Pengawasan Pangan Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1442H



Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1442H, Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Banyumas melaksanakan intensifikasi pangan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), baik dari segi legalitas maupun mutu pangan yang beredar. Kegiatan ini berlangsung selama 6 Tahap mulai tanggal 9 April 2021 s.d. 21 Mei 2021 di 4 Kabupaten wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Selain itu juga ada pengujian takjil di Taman Makam Pahlawan Tanjung tanggal 27 April 2021, untuk memastikan keamanan pangan dari 4 bahan berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin-B dan Metanil Yellow).

HIGHLIGHT KEGIATAN BULAN MEI

Konferensi Pers Hasil Intensifikasi Pangan Selama Ramadhan dan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021



Konferensi Pers dilaksanakan di Pendopo Sipanji Banyumas dengan mengundang lintas sektor terkait. Intensifikasi pengawasan pangan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas dilakukan di 4 wilayah pengawasan yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan kabupaten Banjarnegara. Petugas Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melakukan pengawasan terhadap 22 sarana distribusi pangan mencakup pasar swalayan / toko modern, gudang distributor pangan, dan kios di pasar tradisional. Selain fokus terhadap pangan olahan terkemas yang merupakan objek pengawasan BPOM, pada saat bulan Ramadan pengawasan juga dilakukan kepada pedagang-pedagang yang menjual pangan buka puasa (takjil) serta pedagang di pasar-pasar tradisional.

KIE Narasumber dengan lintas sektor



Pada Mei 2021, Loka POM Banyumas hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di 4 wilayah pengawasan. Seperti kegiatan KIE Keamanan Pangan IRTP Desa Rejamulya Cilacap, Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi Sanitarian Puskesmas wilayah Banyumas, dan Dialog Lintas Purwokerto Pagi yang diselenggarakan oleh Pro 1 Radio Republik Indonesia (RRI) Purwokerto.

HIGHLIGHT KEGIATAN BULAN JUNI

Kunjungan Kerja Sekretaris Utama Badan POM



Selama 2 hari tanggal 7-8 Juni 2021, Ibu Dra. Elin Herlina, Apt, M.P., Sekretaris Utama Badan POM RI bersama Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, Biro Umum Badan POM, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Kerjasama serta Balai Besar POM di Semarang melakukan kunjungan kerja di Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan Sekolah



Selama 2 hari tanggal 9-10 Juni 2021 Balai Besar POM di Semarang dan Loka POM Banyumas melaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa Gunung Lurah dan Desa Petarangan yang diikuti sebanyak 50 peserta terdiri kader desa dan lintas sektor terkait dan Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah yang diikuti sebanyak 49 Sekolah mencakup SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari program Keamanan Pangan Jawa Tengah Tahun 2021 yang merupakan Program Pemberdayaan Masyarakat terkait Keamanan Pangan yang dilakukan Badan POM secara terpadu yang sebelumnya juga sudah dilakukan terhadap Petugas Pasar.

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2021 disusun sebagai bentuk evaluasi kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk mengetahui capaian yang telah diperoleh serta tantangan dan hambatan yang dihadapi. Laporan Kinerja Interim dapat membantu dalam merumuskan strategi serta upaya untuk meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas di triwulan berikutnya. Laporan ini juga disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam pelaksanaannya, Loka POM di Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 8 Sasaran Strategis yang diukur melalui 18 Indikator Kegiatan. Masing-masing Indikator Kegiatan memiliki target pencapaian setiap triwulan. Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja di Loka POM di Kabupaten Banyumas.

Berikut merupakan Sasaran Strategis, Indikator Kegiatan, serta Target Pencapaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021 :

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target
1.	Terwujudnya Obat Dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Banyumas	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi Syarat	80,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74,00%
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	72,50%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	51,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukas Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,00%
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai Standar	50,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72,50%
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Banyumas yang optimal	Persentase implementasi rencanaaksi RBdi lingkup Loka POM di Kab. Banyumas	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Banyumas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Banyumas	77
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Banyumas secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kab. Banyumas	Efisien(90%)

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas

A. Gambaran Umum Institusi

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Adapun di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 3 (tiga) UPT Badan POM antara lain Balai Besar POM di Semarang, Loka POM di Kota Surakarta, dan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Loka POM di Kabupaten Banyumas memiliki struktur organisasi seperti Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM

B. Analisis Lingkungan Strategis

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2021 sebanyak 24 pegawai, terdiri atas 1 Kepala Loka, 13 pegawai SDM Teknis dan 2 pegawai SDM Administrasi. Selain itu Loka POM di Kabupaten Banyumas juga memiliki 8 pegawai Non ASN, terdiri dari 5 pegawai Administrasi, 1 Security, 1 Driver, dan 1 Cleaning Service. Pada Maret 2021, Loka POM di Kabupaten Banyumas mendapatkan 4 pegawai teknis Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dari redistribusi, sehingga total pegawai saat ini berjumlah 28 pegawai.

Berdasarkan tingkat pendidikan, 82,14% pegawai Loka POM di Kabupaten Banyumas merupakan sarjana setingkat S1 dan S2. Apoteker sebagai profesi di bidang kesehatan menempati porsi terbesar.

b. Luas Wilayah Kerja dan Jumlah Kabupaten

Luas wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas meliputi 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banjarnegara. Wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas terdiri dari 89 kecamatan dan 1132 desa/kelurahan dengan luas wilayah seluruhnya 5.161,05 km² atau sekitar 15,76% dari luas Pulau Jawa.



Gambar 2. Peta Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka POM.

C. Isu Strategis

Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan dimana pandemi covid-19 masih terus berlanjut sampai sekarang dan juga isu-isu yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Badan POM seperti isu obat ilegal, penyalahgunaan obat, obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE), pangan yang mengandung bahan berbahaya, yang sebagian besar dijual melalui sistem distribusi online khususnya untuk kosmetik dan untuk pangan masih banyak ditemukan melalui distribusi offline. Isu-isu tersebut tentunya merupakan tantangan bagi Badan POM khususnya Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk bekerja lebih keras dalam rangka melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya.

INTERNAL

1. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi yang diberikan secara langsung oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas kepada masyarakat belum menjawab ekspektasi masyarakat, karena terbatasnya sumber daya, banyaknya isu di media sosial, dan kompleksitas masalah Obat dan Makanan yang beredar.
2. Semakin canggihnya sistem informasi dan teknologi menyebabkan pengungkapan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan semakin berat terutama penjualan produk ilegal melalui sistem *online*.
3. Personel PPNS di Loka POM Banyumas masih terbatas sehingga proses penyidikan perkara obat dan makanan belum optimal.

4. Laporan masyarakat dalam bentuk surat / *whatsapp* / *e-mail* yang tidak lengkap, tanpa identitas pelapor sehingga tidak bisa ditelusur dan diklarifikasi, hal ini sangat mempengaruhi proses tindak lanjut laporan / pengaduan dan keberhasilan investigasi.

EKSTERNAL

1. Hampir seluruh wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas merupakan wilayah dengan kasus Covid-19 yang tinggi. Hal tersebut berdampak pada pengawasan yang dilakukan menjadi kurang maksimal
2. Mutasi/perpindahan petugas pengawas farmasi dan makanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terutama yang telah mendapat Pelatihan/Bimtek dari Badan POM menjadi salah satu penyebab kegiatan pengawasan obat dan makanan tidak berjalan secara konsisten.
3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga masih terdapat peredaran Obat dan Makanan termasuk iklan yang tidak memenuhi ketentuan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Kedudukan

Loka POM di Kabupaten Banyumas merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dikoordinir oleh Balai Besar POM di Semarang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

- Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian,
- Sertifikasi produk,
- Pengambilan contoh (*sampling*) dan pengujian Obat dan Makanan,
- Intelijen,
- Penyidikan,
- Pengelolaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE),
- Pengaduan masyarakat dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B. Visi dan Misi Badan POM

VISI

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia,
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa,
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

C. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

Profesional	•Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi
Integritas	•Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
Kredibilitas	•Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
Kerjasama Tim	•Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
Inovatif	•Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini
Responsif/Cepat Tanggap	•Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

Gambar 2. Budaya Organisasi Badan POM

D. Kegiatan Utama

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Banyumas menetapkan program-programnya, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan:

- 1) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi pangan dan bahan berbahaya,
- 2) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif,
- 3) Penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan, dan
- 4) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Kegiatan untuk melaksanakan keempat program generik (pendukung):

- 1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan Obat dan Makanan,
- 2) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang,
- 3) Peningkatan Kompetensi SDM, dan
- 4) Peningkatan Kualitas Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat.

E. Kegiatan Prioritas

Kegiatan utama diatas selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut:

a) **Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan**

Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat. Dalam konteks ini,

pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Melaksanakan penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal.

Pemberian sanksi dapat berupa larangan produk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan bahkan sampai *pro justitia*. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- 1) Persentase obat yang memenuhi syarat,
 - 2) Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat,
 - 3) Persentase kosmetik yang memenuhi syarat,
 - 4) Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat,
 - 5) Persentase makanan yang memenuhi syarat.
- b) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri.

Komunikasi dalam rangka koordinasi dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib dilakukan agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan indikator:

- 1) Tingkat kepuasan masyarakat,
 - 2) Jumlah kabupaten atau kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.
- c) Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan

Sumber daya yang dimiliki harus dilakukan pengelolaan secara optimal. Pengelolaan sarana, prasarana, dan tenaga dikelola secara tersinergi sehingga tiga komponen tersebut masing-masing mampu memberikan hasil kerja optimal.

Bangunan dan fasilitasnya selalu dioptimalkan pemanfaatannya, melalui penyempurnaan tata ruang, ketersediaan dan distribusi daya serta perawatan secara disiplin. Peralatan kerja perkantoran, laboratorium dan pengawasan sarana ditingkatkan kelengkapannya, dirawat dan dioptimalkan fungsinya. Pegawai ditingkatkan kompetensi, kredibilitas, inovasi, dan percaya diri menjadi tenaga unggul. Melalui kesinergian diharapkan dapat dihasilkan kinerja produktif. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan indikator : Nilai SAKIP.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka ditetapkan indikator kegiatan sebagai berikut

- 1) Pemenuhan target sampling produk Obat dan Makanan di sektor publik,
- 2) Presentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan,
- 3) Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan,
- 4) Jumlah perkara di bidang obat dan Makanan,
- 5) Jumlah layanan publik,
- 6) Jumlah komunitas yang diberdayakan,
- 7) Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar, dan
- 8) Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2021 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Kriteria	% Capaian
Sangat Baik	$110\% \leq x \leq 120\%$
Baik	$90\% \leq x < 110\%$
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$
Sangat Kurang	$x < 50\%$
Tidak Dapat Disimpulkan	$x > 120\%$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Selama Triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adanya pandemik corona yang sedang melanda semua negara di dunia, menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk terus dapat melakukan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Banyumas. Loka POM di Kabupaten Banyumas tetap berupaya melaksanakan pengawasan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi di tengah keterbatasan saat ini.

Berikut adalah capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas pada Triwulan II Tahun 2021 beserta analisis kendala :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Triwulan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian	Kriteria	Analisis Kendala		
			2021								
			Pembilang	Penyebut	Realisasi						
Stakeholder Perspective											
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5	39	45	86,67	95,76	95,76	Baik	Capaian indikator obat yang memenuhi syarat sudah baik. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya laboratorium di Loka POM di Kabupaten Banyumas sehingga Pengujian masih menginduk ke BBPOM Semarang sehingga Loka hanya melakukan evaluasi pengawasan penandaan label
		IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	16	17	94,12	117,65	117,65	Sangat Baik	Pelaksanaan sampling dan pengujian sampel makanan sudah terlaksana dengan sangat baik. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya laboratorium di Loka POM di Kabupaten Banyumas sehingga Pengujian masih menginduk ke BBPOM Semarang sehingga Loka hanya melakukan evaluasi pengawasan penandaan label
Capaian SS1							106,71	106,71			
Capaian Perspective stakeholder							106,71	106,71			
Internal Process Perspective											
SS2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas	IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,2	0	2	0,00	0,00	0,00	Sangat Kurang	Capaian indikator obat yang aman bermutu berdasarkan hasil pengawasan masih kosong dikarenakan sampel targeted yang diambil oleh Loka semuanya TMK Label. Dalam sampling non pangan targeted, TMK label ikut menentukan TMK produk
		IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	8	9	88,89	120,12	120,12	Sangat Baik	Capaian indikator Pelaksanaan sampling dan pengujian sampel makanan sudah terlaksana dengan sangat baik. Sampel targeted yang belum dilakukan sampling adalah sampel PJAS, yang terkendala karena Pandemi
		IKSS5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	-	-	99,11	111,36	111,36	Sangat Baik	Capaian indikator ini sudah terlaksana dengan sangat baik. Dimana sarana produksi dan distribusi yang diinspeksi sudah melaksanakan perbaikan yang direkomendasikan oleh petugas Loka POM Banyumas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Triwulan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian	Kriteria	Analisis Kendala		
			2021								
			Pembilang	Penyebut	Realisasi						
Internal Process Perspective											
SS2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas	IKSS6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	72,5	-	-	86,84	119,78	119,78	Sangat Baik	Capaian indikator ini sudah terlaksana dengan sangat baik. Sarana yang diinspeksi oleh petugas, terutama sarana pelayanan kefarmasian, sudah melaksanakan perbaikan yang direkomendasikan oleh petugas dan mengirimkan CAPA dengan Loka POM Banyumas
		IKSS7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	65	69	94,20	102,39	102,39	Baik	Capaian indikator ini sudah terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran perjalanan dinas sertifikasi yang sedikit, namun jumlah pemohon cukup banyak sehingga pemeriksaan PSB kadangkala dijadwalkan menunggu ada permintaan PSB lain
		IKSS8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	12	19	63,16	123,84	123,84	Tidak Dapat Disimpulkan	Capaian indikator ini sudah terlaksana. Nilai capaian yang tinggi dikarenakan sebagian besar industri yang diperiksa memiliki riwayat TMK tahun 2019 atau 2020 yang kemudian sudah melakukan perbaikan sehingga jumlah sarana MK di tahun 2021 meningkat
		IKSS9	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	57	66	90	73,33	128,65	128,65	Tidak Dapat Disimpulkan	Capaian indikator ini sudah terlaksana. Nilai capaian yang tinggi dikarenakan banyaknya sarana Puskesmas yang diperiksa dalam rangka intensifikasi vaksin Covid-19, dan sebagian besar sudah memenuhi ketentuan.
Capaian SS2								100,88	100,88		
SS3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	IKSS10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86	-	-	90,42	105,14	105,14	Baik	Capaian indikator ini sudah terlaksana dengan baik. Target triwulan dirubah dari yang semula 73% menjadi 83%
Capaian SS3								105,14	105,14		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Triwulan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian	Kriteria	Analisis Kendala		
			2021								
			Pembilang	Penyebut	Realisasi						
Internal Process Perspective											
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSS11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	-	-	18,60	93,00	93,00	Baik	Capaian indikator ini sudah terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi adalah sampling targeted sebagian besar belum dilaksanakan. Sampling targeted produk kosmetik juga sebagian disimpan untuk intensifikasi pengawasan produk kosmetik tertentu menunggu surat dari pusat.
		IKSS12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	-	-	22,31	111,55	111,55	Sangat Baik	Capaian indikator Pelaksanaan sampling dan pengujian sampel makanan sudah terlaksana dengan sangat baik. Sampel targeted yang belum dilakukan sampling adalah sampel PJAS, yang terkendala karena Pandemi
Capaian SS4								102,28	102,28		
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSS13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	-	-	33,75	84,38	84,38	Cukup	Kegiatan penindakan berdasarkan perkara yang ditangani hingga serah tahap 2. Hingga saat ini terdapat 1 perkara carry over tahap SPDP dan 2 perkara tahun berjalan hingga Serah Tahap 1
Capaian SS7								84,38	84,38		
Capaian Internal Process Perspective								98,17	98,17		
Learning & Growth Perspective											
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas	50	4	8	50,00	100,00	100,00	Baik	Capaian indikator ini sudah terlaksana. Rencana aksi RB direncanakan 2 kali dalam satu triwulan.
		IKSS15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	40	21	45	46,67	116,67	116,67	Sangat Baik	Capaian indikator ini sudah terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi adalah dokumen masih dihitung berdasarkan jenis, bukan ketepatan pelaporan
		IKSS16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40	3	5	60,00	150,00	150,00	Sangat Baik	Capaian indikator ini sudah terlaksana dengan sangat baik.
Capaian SS8								122,22	122,22		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)			Target Triwulan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian	Kriteria	Analisis Kendala
					2021						
					Pembilang	Penyebut	Realisasi				
Learning & Growth Perspective											
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS17	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	77	-	-	-	-	-	-	Dihitung pada akhir tahun
Capaian SS9								-	-		
SS10	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Banyumas	80	-	-	84,00	105,00	105,00	Baik	Capaian indikator ini sudah terlaksana dengan baik.
Capaian SS10								105,00	105,00		
Capaian Learning & Growth Perspective								113,61	113,61		
NPS TOTAL								106,16	106,16		

B. Laporan Capaian Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Banyumas memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 3.814.147.000,-. Realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2021 adalah Rp 1.785.893.338,- atau 48,52%. Telah dilakukan belanja modal berupa pembelian 2 unit sepeda motor yang direalisasikan pada Juni 2021. Penyerapan anggaran sedikit terkendala pada bulan Juni, dimana penjadwalan perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan di wilayah perbatasan terkendala karena sebagian besar wilayah Cilacap kasus positif covid melonjak sehingga tidak dapat dijadwalkan untuk menginap.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Berdasar Analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5	86,67	95,77	16.868.500	3.827.795	22,69	4,22	3,22	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	94,12	117,65	9.600.500	1.267.435	13,20	8,91	7,91	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,2	-	-	39.668.500	5.712.795	14,40	-	-1,00	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	88,89	120,12	32.400.500	3.152.435	9,73	12,35	11,34	75 %
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	99,11	111,36	41.451.000	14.464.788	34,90	3,19	2,19	75 %
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	72,5	86,84	119,78	58.426.000	13.545.596	23,18	5,17	4,16	75 %
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	207,25	225,27	19.208.000	11.810.000	61,48	3,66	2,66	75 %
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	63,16	123,84	49.360.000	17.046.000	34,53	3,59	2,58	75 %
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	79,63	139,70	90.062.000	32.399.503	35,97	3,88	2,88	75 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	73	90,42	123,86	130.178.000	20.691.200	15,89	7,79	6,79	75 %
11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	18,6	37,20	37.500.000	1.797.500	4,79	7,76	6,76	75 %
12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	22,31	44,62	37.500.000	1.797.500	4,79	9,31	8,30	75 %
13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	33,75	84,38	232.031.000	76.089.844	32,79	2,57	1,57	80 %
14	Persentase implementasi rencana aksi RB	40	50	125,00	354.862.000	145.561.404	41,02	3,05	2,04	75 %
15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	40	46,67	116,68	2.481.613.000	1.428.650.182	57,57	2,03	1,02	86 %
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40	60	150,00	6.230.000	120.000	1,93	77,88	76,8	75 %
17	Indeks Profesionalitas ASN				30.120.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	80	84	105,00	13.994.000	7.959.361	56,88	1,85	0,84	88 %
	TOTAL			108,25	3.681.073.000	1.785.893.338	48,52	2,23	1,23	84 %

Tabel 3. Capaian Tingkat Efisiensi S.D Triwulan II Tahun 2021

Tingkat efektifitas penggunaan anggaran di Loka POM di Kabupaten Banyumas sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 84%. Nilai tersebut sudah melebihi target tingkat efisiensi penggunaan anggaran Triwulan II yang hanya sebesar 80%. Dari hasil evaluasi yang dilakukan pada 15 Juli 2021, sebagian besar serapan anggaran diperoleh dari belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan belanja modal masih sangat sedikit. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebagai berikut:

1. Terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19 di area pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas yang mengakibatkan beberapa kali dilakukan pembatasan kegiatan, baik oleh Bupati setempat maupun pemerintah pusat. Hal tersebut menyebabkan kegiatan pengawasan rutin Obat dan Makanan tidak dapat dijalankan secara optimal.
2. Beberapa kegiatan yang dijadwalkan untuk dilaksanakan secara luring berganti menjadi kegiatan secara daring akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan sebagian dana yang sudah direncanakan tidak dapat digunakan sebelum dilakukan revisi anggaran.
3. Kegiatan pertemuan secara luring belum dapat dilaksanakan sehingga program KIE

kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berbentuk pertemuan langsung mengalami kendala dalam pelaksanaannya

4. Pandemi juga mengakibatkan pilihan variasi sampel pada kegiatan sampling menjadi terbatas, sehingga sebagian besar produk yang dibeli harganya murah, terutama produk pangan.
5. Kegiatan sampling PJAS belum dapat dilakukan karena sekolah-sekolah masih tutup. UPT sedang menunggu arahan dari Deputy Pengawasan Pangan Olahan untuk instruksi lebih lanjut. Hal ini juga menyebabkan dana perjalanan sampling belum digunakan secara maksimal karena sebagian besar dana tersebut direncanakan untuk menunjang kegiatan sampling PJAS.

Dari kendala tersebut kemudian disusun rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan III untuk mempercepat penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Menjadwalkan kembali sarana-sarana yang belum terealisasi pada Triwulan II
2. Melakukan revisi DIPA dan revisi anggaran pada 16 Juli 2021
3. Melakukan evaluasi hasil kegiatan sampling hingga Juni 2021 dengan mempertimbangkan realisasi anggaran sehingga pembelian sampel dapat disesuaikan pada sampel targeted di Triwulan III
4. Merencanakan penggunaan sebagian dana perjalanan sampling mulai Triwulan III.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sebagian besar kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Banyumas seperti pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling, pengujian Obat dan Makanan, layanan informasi konsumen, dan kegiatan layanan perkantoran dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan hingga Triwulan II.
2. Penyerapan anggaran untuk belanja barang dan belanja modal masih dibawah target yang ditetapkan hingga Triwulan II. Beberapa kendala yang dihadapi utamanya terkait pembatasan kegiatan selama pandemi Covid-19, dimana hal tersebut membuat sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

B. SARAN

Perlu dilakukan upaya-upaya agar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas dapat lebih optimal, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi secara terstruktur dan berkesinambungan antara Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Loka POM Banyumas dalam rangka implementasi Inpres No. 3/2017 dan Permendagri No. 41/2018.
2. Memberdayakan petugas pengawas di Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pelatihan/bimtek sehingga dapat ikut membantu pengawasan Obat dan Makanan di wilayahnya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Tim CJS (*Criminal Justice System*) dalam kegiatan penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.
4. Menggunakan sistem informasi/olah data yang terintegrasi untuk semua bidang kegiatan di Loka POM di Kabupaten Banyumas.
5. Pengajuan untuk penyesuaian kembali RO untuk beberapa Indeks Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sehingga perhitungan capaian menjadi selaras dengan DO Loka.